

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang memiliki peran krusial sebagai pilar utama penerimaan negara sekaligus tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah memperoleh kemampuan finansial dari penerimaan pajak. Alokasi dana mandiri ini berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pembangunan nasional tidak terlepas dari tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan urusan perpajakan pada posisi yang sangat penting, khususnya sebagai kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah menjadi instrumen pendapatan mandiri yang krusial bagi pemerintah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Setiap daerah diharapkan mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penerimaan PAD yang bersumber dari potensi lokal. Kemandirian fiskal tersebut sekaligus akan mengurangi ketergantungan finansial terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

Kemajuan dan kemandirian suatu daerah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber pendapatan murni yang berhasil dikelola. Tantangan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, termasuk sektor pajak, akan semakin besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah harus menggali potensi tersebut secara maksimal agar fungsi anggaran dapat berjalan selaras dengan tuntutan kebutuhan publik yang kian dinamis.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pungutan daerah yang memberikan kontribusi sangat strategis terhadap PAD, khususnya pada tingkat provinsi. PKB menjadi sumber pendanaan yang potensial dan berkelanjutan karena dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi maupun badan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 96 menyatakan bahwa penerimaan dari PKB digunakan untuk pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan. Dana tersebut juga dialokasikan untuk pengembangan sarana dan fasilitas transportasi umum yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia turut mendorong bertambahnya potensi penerimaan PKB. Potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di wilayah tersebut cenderung meningkat selama periode 2020-2024. Jumlah kendaraan tersebut sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Kondisi tersebut ditunjukkan secara rinci pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Unit Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2020	18.141.696
2021	20.320.743
2022	20.007.946
2023	20.399.337
2024	21.235.787

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, (2025) data diolah penulis.

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan jumlah unit kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah secara umum meningkat selama periode 2020-2024. Tren kenaikan tersebut sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. BPS Provinsi Jawa Tengah (2025) menyatakan berkurangnya jumlah kendaraan pada tahun 2022 tidak mempresentasikan penurunan daya beli masyarakat secara riil. Fenomena tersebut merupakan dampak dari kebijakan penataan dan pembersihan basis data operasional Samsat secara nasional.

Korlantas Polri bersama Tim Pembina Samsat nasional gencar mengimplementasikan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Aturan tersebut menetapkan penghapusan data registrasi kendaraan secara permanen. Tindakan ini diterapkan apabila pemilik tidak melakukan registrasi ulang minimal dua tahun setelah masa berlaku STNK berakhir. Penerapan aturan tersebut menyebabkan sejumlah kendaraan pasif atau rusak total dihapus dari basis data. Pembersihan data ini secara statistik berdampak pada penurunan jumlah kendaraan pada tahun 2022. Kebijakan tersebut mulai disosialisasikan secara luas pada tahun 2022 sebagai upaya penertiban administrasi dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (ANTARA, 2022).

Penurunan tersebut tidak berlangsung secara berkelanjutan karena jumlah kendaraan bermotor kembali meningkat pada periode berikutnya. Kondisi ini seharusnya mencerminkan besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor PKB di tingkat provinsi. Potensi tersebut namun belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah.

BAPENDA Provinsi Jawa Tengah pada laman www.antaranews.com menyatakan realisasi penerimaan PKB hingga September 2024 baru mencapai sekitar 60 persen. Nilai tersebut masih jauh dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp6.500.000.000.000. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat selisih antara potensi penerimaan PKB besar dengan realisasi yang diperoleh. Fenomena ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan WP kendaraan bermotor belum mencapai titik ideal. Peningkatan kepatuhan tersebut sangat diperlukan demi mendukung optimalisasi penerimaan PAD dari sektor PKB.

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus pusat kegiatan perekonomian. Wilayah ini memiliki tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang relatif tinggi. Informasi mengenai perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kota Semarang selama periode 2020-2024 disajikan dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2 Data Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Kota Semarang Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2020	1.693.227
2021	1.875.781
2022	1.823.982
2023	1.917.278
2024	1.985.109

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, (2025) data diolah penulis.

Data pada tabel tersebut menyajikan bahwa jumlah unit kendaraan bermotor di Kota Semarang secara umum mengalami peningkatan selama periode 2020-2024. Tren kenaikan ini sempat terhenti akibat adanya penurunan jumlah kendaraan pada tahun 2022. Penurunan jumlah kendaraan bermotor tersebut tercatat mencapai 51.799 unit.

Selaras dengan fenomena di tingkat provinsi, penurunan tersebut disebabkan oleh kebijakan administratif penghapusan nomor registrasi kendaraan yang menunggak pajak. Penurunan tersebut hanya terjadi sementara karena jumlah kendaraan bermotor kembali meningkat pada tahun berikutnya. Tren tersebut seharusnya mampu mencerminkan besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor PKB. Pertumbuhan volume kendaraan ini belum berbanding lurus dengan optimalisasi realisasi penerimaannya.

BAPENDA Provinsi Jawa Tengah pada laman www.joglojateng.com menyatakan bahwa sejumlah WP belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib dan tepat waktu. Kondisi tersebut berdampak langsung pada fluktuasi realisasi pendapatan PKB. Informasi mengenai capaian target dan realisasi penerimaan PKB di seluruh wilayah Kota Semarang disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Penerimaan PKB Kota Semarang Tahun 2024

Tempat	Jumlah Penerimaan	Presentase Realisasi
Samsat Kota Semarang I	275.187.867.500	76,36%
Samsat Kota Semarang II	277.256.000.900	92,94%
Samsat Kota Semarang III	196.798.680.700	72,60%
Jumlah	749.242.549.100	

Sumber: BAPENDA Jateng, (2025) data diolah penulis.

Data pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa realisasi PKB di seluruh kantor Samsat wilayah Kota Semarang belum mampu mencapai target penerimaan secara penuh (100%). Capaian yang belum optimal ini mengindikasikan adanya masalah mendasar pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB. Optimalisasi pendapatan daerah di Kota Semarang akan menghadapi hambatan serius jika kondisi tersebut terus berlanjut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan berbagai kebijakan insentif pajak sebagai upaya untuk merespons permasalahan tersebut. Pemberian insentif tersebut sejalan dengan pendapat Nuridah & Megawati (2022). Penelitiannya menyatakan bahwa insentif perpajakan merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan peran aktif sekaligus meningkatkan kepatuhan WP. Limantoro dkk. (2022) juga mengemukakan bahwa sebagian besar WP di Jawa Timur sepakat terhadap manfaat insentif pajak.

Kebijakan insentif tersebut memiliki fungsi aktif sebagai pendorong bagi masyarakat untuk menunaikan kewajibannya. Tanpa pemberian insentif, jumlah masyarakat yang membayar pajak juga akan cenderung menurun. Kondisi tersebut nantinya juga berdampak pada penurunan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Mindan & Ardini (2022) menegaskan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP di kantor bersama Samsat Surabaya Selatan. Kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan WP. Peningkatan kepatuhan ini berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan PKB.

Penelitian dengan konteks yang sama memiliki temuan berbeda. Perbedaan hasil antarpelitian terdahulu menimbulkan inkonsistensi yang nyata. Kondisi tersebut memicu urgensi untuk menguji kembali faktor-faktor penentu realisasi penerimaan PKB.

Hidayat (2023) menyatakan bahwa insentif PKB tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan insentif perpajakan belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap kepatuhan WP. Evaluasi

lebih lanjut diperlukan guna memastikan kebijakan tersebut mampu berjalan secara efektif dan optimal. Oleh karena itu, selain faktor eksternal berupa kebijakan insentif, aspek internal dari WP juga perlu diperhatikan. Salah satu faktor internal tersebut adalah kesadaran WP. Kesadaran WP dianggap sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesadaran WP merujuk pada situasi ketika seseorang mengetahui, mengerti, dan mengimplementasikan ketentuan perpajakan yang ditetapkan. Pemahaman tersebut mendorong WP untuk menghitung, membayar, melapor pajak dengan benar, dan melunasi kewajibannya secara sukarela (Mahapsari dkk., 2024). Mahapsari dkk. (2024) menyatakan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Tingkat kepatuhan WP berpotensi mengalami peningkatan apabila diikuti oleh kesadaran yang semakin tinggi. Studi tersebut selaras dengan Maharani dkk. (2025). Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran WP berkontribusi positif terhadap kepatuhan.

Temuan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Dhiu & Handayani (2023). Penelitiannya mengemukakan bahwa kesadaran WP berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dhiu & Handayani (2023) menyatakan bahwa tingkat kesadaran WP belum cukup untuk mendorong kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan WP dan munculnya rasa ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Dampak dari hal tersebut yaitu WP cenderung tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara patuh. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran WP dapat berperan sebagai salah satu faktor penghambat dalam meningkatkan kepatuhan. Atas dasar tersebut, untuk mengatasi rendahnya pemahaman WP, diperlukan strategi edukasi yang efektif melalui sosialisasi perpajakan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara optimal.

Sosialisasi perpajakan menjadi faktor yang berperan penting dalam memperkuat hubungan antara insentif pajak dan kesadaran WP terhadap kepatuhan. Sosialisasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk dorongan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan WP (Purwati dkk., 2022). Kegiatan sosialisasi dapat membantu masyarakat untuk memahami manfaat pajak dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Pemahaman tersebut akan menumbuhkan kesadaran dan keinginan untuk taat terhadap kewajiban pajak. Maharani dkk. (2025) mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP pada UPTD Samsat Batam Centre.

Penelitian tersebut berbanding terbalik dengan Listyowati dkk. (2021) yang mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Sosialisasi yang intensif dan efektif dapat menjadi variabel moderasi dalam model penelitian. Kehadiran variabel ini diharapkan mampu memperkuat pengaruh insentif dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan WP.

Penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi temuan mengenai pengaruh insentif pajak, kesadaran WP, dan sosialisasi perpajakan terhadap

kepatuhan PKB. Penelitian terdahulu menghasilkan temuan yang beragam. Hasil penelitian menemukan pengaruh signifikan, sedangkan penelitian lainnya memperoleh hasil yang berbeda. Perbedaan temuan tersebut mengonfirmasi adanya celah penelitian yang nyata. Hubungan antarvariabel ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks dan karakteristik WP yang berbeda.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi-studi terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan PKB. Studi ini mengacu pada penelitian Limantoro dkk. (2022). Penelitiannya menguji tentang pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan WP dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Pengembangan model juga mengacu pada penelitian Mahapsari dkk. (2024) yang menguji pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan PKB.

Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini mengintegrasikan variabel insentif pajak dan kesadaran WP dalam satu model analisis. *Theory of Planned Behavior* turut digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan teoritis yang menjelaskan perilaku kepatuhan WP. Pengujian model ini difokuskan di Kota Semarang karena wilayah tersebut memiliki fluktuasi realisasi penerimaan PKB yang cukup dinamis. Kota Semarang selaku ibu kota Provinsi Jawa Tengah memiliki mobilitas tinggi dan menyimpan potensi penerimaan daerah yang sangat besar. Besarnya peluang tersebut sayangnya belum sepenuhnya diikuti oleh capaian realisasi pajak yang optimal secara konsisten. Karakteristik wilayah yang dinamis ini membuat Kota Semarang dinilai sangat relevan sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WP di Kota Semarang. Langkah tersebut didasarkan pada fenomena,

kesenjangan empiris, serta hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan temuan beragam. Fokus analisis diarahkan pada pengaruh insentif pajak dan kesadaran WP terhadap kepatuhan PKB dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Kepatuhan WP menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan PKB sebagai sumber PAD. Atas dasar pertimbangan logis, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor yang Dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan di Kota Semarang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan permasalahan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan PKB di Kota Semarang. Analisis tersebut didasarkan pada fenomena empiris, landasan teori, dan hasil studi terdahulu yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang?
2. Apakah kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang?
3. Apakah sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara insentif pajak dan kepatuhan PKB di Kota Semarang?
4. Apakah sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan antara kesadaran WP dan kepatuhan PKB di Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan, studi ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh positif insentif pajak terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang.
2. Menganalisis pengaruh positif kesadaran WP terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang.
3. Menganalisis sosialisasi perpajakan dalam memperkuat hubungan antara insentif pajak terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang.
4. Menganalisis sosialisasi perpajakan dalam memperkuat hubungan antara kesadaran WP terhadap kepatuhan PKB di Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Kontribusi teoritis tersebut berfokus pada topik insentif pajak, kesadaran WP, kepatuhan PKB, dan sosialisasi perpajakan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan PKB. Tambahan literatur tersebut secara khusus mengkaji peran insentif

pajak, kesadaran WP, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bahan studi ilmiah untuk menambah wawasan pembaca. Studi ini juga dapat menjadi acuan serta sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman penulis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan PKB. Fokus pemahaman tersebut secara khusus berkaitan dengan peran insentif pajak, kesadaran WP, dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan daerah. Rekomendasi tersebut khususnya berkaitan dengan pemberian insentif PKB serta peningkatan program sosialisasi perpajakan guna mendorong kepatuhan WP.

3) Bagi WP

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran WP mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar

PKB. Edukasi tersebut juga mengulas besarnya manfaat insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan ini terdiri atas lima bab pokok yang masing-masing diuraikan ke dalam beberapa subbagian guna memberikan penjelasan secara sistematis. Uraian rincian dari setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi praktis, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi penelitian.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Bab ini memuat dasar-dasar teori yang relevan dengan topik penelitian, ulasan terhadap studi terdahulu, serta kerangka konseptual sebagai dasar dalam perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk desain, penentuan populasi beserta sampel, definisi variabel, instrumen, hingga teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menampilkan hasil analisis data yang didapatkan selama proses penelitian, serta interpretasi dan pembahasan terhadap temuan empiris dengan dikaitkan teori maupun hasil studi sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup simpulan akhir secara menyeluruh, dilengkapi dengan implikasi, keterbatasan, serta rekomendasi bagi penelitian mendatang atau kebijakan terkait.